

Pers Release Anugerah Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2023

Kegiatan Penganugerahan Keterbukaan Informasi Badan Publik Se-Bali dilaksanakan pada hari Kamis, 28 Desember 2023 bertempat di Wiswa Sabha Utama Kantor Gubernur Bali. Komisi Informasi Provinsi Bali mengundang Bapak Pj. Gubernur Bali untuk memberikan sambutan dan sekaligus berkenan menyerahkan penghargaan kepada Badan Publik Informatif. Komisi Informasi Provinsi Bali juga mengundang seluruh Bupati/Walikota Se-Bali. Sejumlah 38 (tiga puluh delapan) Pimpinan Badan Publik menerima langsung Plakat Informatif serta 3 (tiga) Pemerintah Kabupaten/Kota implementasi Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Terbaik menerima Sertifikat “Praja Anindita Mahottama” sebagai *Pemerintahan yang utama dan terbuka* dalam pelayanan keterbukaan informasi publik dari Bapak Pj. Gubernur Bali.

Komisi Informasi Provinsi Bali menghaturkan terimakasih kepada Bapak Pj. Gubernur Bali yang telah berkenan menghadiri dan berkenan pula menyerahkan secara langsung Penganugerahan Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2023. Hal ini menunjukkan komitmen yang besar dari Pimpinan Daerah khususnya Bapak Pj. Gubernur Bali dalam melaksanakan keterbukaan informasi publik di Bali. Pentingnya Penganugerahan keterbukaan informasi publik adalah sebagai salah satu bentuk laporan pelaksanaan tugas Komisi Informasi Provinsi Bali, yang secara regulasi diatur dalam UU 14 Tahun 2008, Komisi Informasi Provinsi bertanggungjawab kepada Gubernur dan menyampaikan laporan tentang pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenangnya kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Berikutnya adalah dalam rangka memotivasi badan publik dalam melaksanakan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik untuk terus meningkatkan kualitas layanan informasi publik kepada masyarakat sebagai pengguna informasi publik.

Disampaikan oleh ketua Komisi Informasi Provinsi Bali, beberapa capaian dalam hal Keterbukaan Informasi Publik pada tahun 2023 diantaranya: **Dalam pengukuran Indeks Keterbukaan Informasi Publik, Bali berada pada situasi baik dengan skor IKIP 81,86 (tiga besar nasional), Desa Tegal Harum sebagai desa Transparan (sebagai desa terbaik ke-1 Indonesia zona bagian tengah)** dalam implementasi Keterbukaan Informasi Publik di Desa, berdasarkan penilaian dalam Program Apresiasi Desa yang dilaksanakan atas kerjasama Komisi Informasi Pusat, Bappenas, dan Kemendesa PDTT. **Pemerintah Provinsi Bali kembali**

memperoleh Anugerah sebagai Badan Publik Informatif berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi publik tahun 2023 yang dilaksanakan oleh Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia.

Monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi badan publik ini dilaksanakan secara elektronik (E-Monev). Pelaksanaan kegiatan ini sudah berjalan sejak bulan juli 2023 melalui tahapan persiapan dan penyusunan Self Assessment Questioner (SAQ), dan seluruh kegiatan berakhir dengan terselenggaranya Penganugerahan keterbukaan informasi badan publik pada Kamis, 28 Desember 2023. Dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi badan publik tahun 2023, Komisi Informasi Provinsi Bali mengundang badan publik untuk berpartisipasi berjumlah 120 badan publik, yang terdiri dari 6 kategori badan publik yaitu; 10 instansi tingkat wilayah/provinsi, 9 PPID Pemerintah Kabupaten/Kota, 35 OPD Pemerintah Provinsi, 27 OPD Pemerintah Kabupaten/Kota, 18 Pemerintah Desa, dan 21 BUMD/Perusda.

Dari 120 badan publik yang diundang, 118 (98,3%) badan publik yang melakukan registrasi, terdapat 112 (93,3%) badan publik menjawab SAQ secara elektronik. Setelah melalui proses verifikasi dan penilaian, maka diumumkan hasilnya melalui Surat Keputusan Komisi Informasi Provinsi Bali Nomor 174/01/XII/KI.BALI/2023 tentang Hasil Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Pada Badan Publik Se-Bali Tahun 2023. Ringkasan Hasil Monev KIP Tahun 2023 :

No	Kategori Badan Publik	Kualifikasi Hasil Monev KIP 2023					Jumlah Badan Publik
		Informatif	Menuju Informatif	Cukup Informatif	Kurang Informatif	Tidak Informatif	
1	PPID Pemerintah Kabupaten/Kota	7 BP (77,8%)	2 BP (22,2%)	-	-	-	9 BP
2	Instansi Tk. Wilayah/Provinsi	5 BP (62,5 %)	-	3 BP (37,5 %)	-	-	8 BP
3	OPD Pemprov	9 BP (25,71 %)	5 BP (14,29 %)	10 BP (28,57 %)	1 BP (2,86 %)	10 BP (28,57 %)	35 BP
4	OPD Pemkab/Kota	8 BP (29,63 %)	10 BP (37,04 %)	6 BP 22,22 (%)	2 BP (7,41 %)	1 BP (3,70 %)	27 BP
5	BUMD/Perusda Prov/Kabupaten/Kota	3 BP (14,29 %)	6 BP (28,57 %)	8 BP (38,10 %)	1 BP (4,76 %)	3 BP (14,29 %)	21 BP
6	Pemerintah Desa	6 BP (33,33 %)	4 BP (22,22 %)	6 BP (33,33%)	-	2 BP (11,11 %)	18 BP

Rekap Total	38 BP (32,20 %)	27 BP (22,88 %)	33 BP (27,97 %)	4 BP (3,39 %)	16 BP (13,56 %)	118 BP
--------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------	--------------------------	----------------------------	---------------

Melihat hasil seperti pada tabel diatas, terdapat 38 badan publik (32,20%) memperoleh kualifikasi Informatif, 27 badan publik (22,88%) memperoleh kualifikasi Menuju Informatif, sehingga terdapat 65 badan publik (55,08%) yang telah berada pada kualifikasi Informatif dan kualifikasi Menuju Informatif. Sedangkan 33 badan publik dengan kualifikasi Cukup Informatif (27,97%), serta terdapat 20 badan publik (16,95%) yang masih berkualifikasi Kurang Informatif dan kualifikasi Tidak Informatif.

Dengan masih adanya badan publik pada kualifikasi Tidak Informatif dan Kurang Informatif, Komisi Informasi Provinsi Bali akan terus berupaya mendorong untuk meningkatkan pelayanan dan pengelolaan informasi publik hingga berada pada kualifikasi Informatif. Dengan capaian ini Komisi Informasi Provinsi Bali tidak berpuas diri, kami harus terus menekankan kepada semua badan publik untuk menjadikan keterbukaan informasi sebagai suatu budaya kita bersama, untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, efektif, dan efisien. Dan juga kami sadari bahwa Komisi Informasi Provinsi Bali, harus lebih menggelorakan budaya keterbukaan informasi publik, yang mana juga harus didukung juga oleh komitmen dari pemerintah.

Perlu ditekankan bahwa hasil penganugerahan ini, bukanlah suatu ajang yang dimaknai sebagai kontestasi antar badan publik, tetapi harus kita maknai sebagai tolok ukur implementasi keterbukaan informasi pada badan publik di Bali, yang terpenting adalah pada kualifikasi, bukan peringkat dan nilai suatu badan publik. Komisi Informasi Provinsi Bali menyampaikan terimakasih kepada seluruh pimpinan badan publik yang telah berpartisipasi dan berkomitmen terhadap keterbukaan informasi publik. Semoga kedepannya, pelaksanaan keterbukaan informasi publik menjadi lebih berkualitas dan memberikan manfaat bagi bangsa dan negara. Terimakasih, kepada semua pihak yang telah bekerja dari awal hingga akhir, yang membantu demi suksesnya agenda Penganugerahan Keterbukaan Informasi Publik tahun 2023.

Daftar Badan Publik Informatif Tahun 2023:

1. Badan Pusat Statistik Provinsi Bali
2. Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Bali
3. Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Bali
4. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali
5. BPJS Kesehatan Kedeputian Wilayah Bali, NTT dan NTB
6. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bali
7. Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Bali
8. Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Bali
9. Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah Provinsi Bali
10. Inspektorat Provinsi Bali
11. Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Bali
12. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Bali
13. Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Bali
14. Dinas Perhubungan Provinsi Bali
15. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Badung
16. Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Buleleng
17. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gianyar
18. Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Denpasar
19. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jembrana
20. Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Bangli
21. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Klungkung
22. Dinas Kesehatan Kabupaten Klungkung
23. Dinas Kesehatan Kabupaten Buleleng
24. Dinas Kesehatan Kabupaten Badung
25. Dinas Pendidikan Kabupaten Tabanan
26. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Buleleng
27. Dinas Kesehatan Kabupaten Bangli
28. Dinas Sosial Kabupaten Jembrana
29. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bangli
30. Desa Dalung, Kec. Kuta Utara, Kab. Badung
31. Desa Ekasari, Kec. Melaya, Kab. Jembrana
32. Desa Nyuhtebel, Kec. Manggis. Kab. Karangasem
33. Desa Bongkasa, Kec. Abiansemal, Kab. Badung
34. Desa Sanur Kauh, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar
35. Desa Daging Puri Kangin, Kec. Denpasar Utara, Kota Denpasar
36. Perumda Air Minum Tirta Sanjiwani Kabupaten Gianyar
37. PT. BPR Bank Daerah Gianyar (Perseroda)
38. PT. Jamkrida Bali Mandara (Perseroda)

Penghargaan Khusus “Praja Anindita Mahottama” kepada 3 (tiga) Pemkab/Kota KIP Terbaik :

1. Pemerintah Kabupaten Badung
2. Pemerintah Kabupaten Buleleng
3. Pemerintah Kabupaten Gianyar